

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan pada penelitian adalah:

2.1.1. Faktor Kemenangan

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat terpilih dalam Pilkades, salah satunya adalah figure. Figur dapat di artikan sebagai segala identitas yang melekat dalam diri seseorang. Identitas di sini bisa berupa fisik, latar belakang sehingga menjadi pertimbangan pemilih dan memilih calon Kepala Desa. Dalam konteks Pilkades, pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat Desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat di manfaatkan untuk pembelajarn politik bagi masyarakat. Pada momen ini masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah di gelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pilpres pilkada gubernur, pilkada bupati, dan pemilu legislatif. Tak ketinggalan adalah pilkades yang berkompetisi politik dalam pemilu tingkat desa. Selain dari faktor figure faktor kemenangan lainnya yang ingin di capai dalam setiap pemilihan tidak bisa terlepas dari pada strategi yang di gunakan dalam melakukan proses perpolitikan.

Menurut Seinberg (dalam buku teori-teori oleh TA Pito 2000), strategi adalah rencana untuk tindakan kaitannya dengan pilkades, strategi berperan

sebagai kunci kemenangan. Strategi menjadi cara bagaimana timsukses mampu menjangkau calon pemilih sehingga dapat memenangkan pilkades. Dalam strategi politik, pemilihan strategi yang akan di gunakan juga perlu di perhatikan mengingat jenis pemilih yang beragam. Kita mengenal jenis-jenis pemilih di mana terdapat swing voters, konstituen, dan pendukung lain. serta orientasi pemilih menggunakan pendekatan *policy problem solving* dan idiologi.

Menurut Firmanzah (2008: 109) strategi politik adalah suatu pendekatan komunikasi politik perlu di lakukan oleh para kontestan atau bakal calon untuk memenangi kontestasi dalam pilkades. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besarnya pendukungnya, masa pengembangan dan pendukung kontestan yang lain. identifikasi ini di lakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan di peroleh pada saat pemilihan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang di perlukan terhadap masing masing kelompok pemilih.

2.1.2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak adalah pemilihan yang dilakukan dalam konteks serentak untuk satu wilayah kabupaten atau kota. Aturan mengenai pilkades serentak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Terbitnya Permendagri tersebut adalah sebagai tindak lanjut amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Permendagri disebutkan bahwa pada BAB II Pasal 2 Pilkades dilakukan secara

serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pilkades satu kali maksudnya adalah Pilkades dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten atau kota.

Desa merupakan suatu sistem sosial dengan lembaga sendiri yang dimana desa memiliki lembaga politik, ekonomi, pradilan dan sosial-budaya yang di kembangkan oleh msyarakatnya sendiri. Misalnya didalam lembaga politik, desa mempunyai Kepala Desa dan perangkat desa yang tata cara serta pengaturan tugas pokok dan fungsinya di kembangkan sendiri, bukan berdasarkan instruksi dari pemerintah. Kepala Desa adalah pimpinan desa yang menjalankan serta mengatur segala kegiatan yang ada dalam pemerintah desa dan juga mampu menerima aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan tugas-tugas serta kewajiban nya dalam pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Pasal 26 ayat (1) Di jelaskan Bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan msyrakat Desa.

2.2. Teori

Teori dari kajian konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Teori Faktor Kemenangan

Kemenangan merupakan suatu hal yang sangat tidak lazim lagi terdengar, faktor kemenangan secara umum dapat di pengaruhi berbagai faktor dalam konteks pertarungan baik secara akademis, politik dan lain sebagainya. Dalam hal

ini faktor kemenangan lebih tertuju kepada konteks politik. Seperti tahun 2018 di Indonesia di laksanakan pilkada serentak untuk memilih kepala daerah. Faktor yang mempengaruhi kemenangan bisa di lihat berdasarkan partisipasi politik, strategi politik, serta bagaimana peran perilaku pemilih di dalam menentukan pilihannya. Partisipasi politik adalah kegiatan suka rela dari masyarakat melalui keterlibatan dalam pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak memengaruhi proses pengambilan kebijakan, (Herbert McClosky 1972) dalam dedi kurnia (2012,44).

Siagian (1985, 21), strategi adalah cara-cara yang di ambil yang sifatnya mendasar dan fudemental yang akan di pergunakan oleh oraganisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu menghitung kendala lingkungan yang pasti akan di hadapi. Menurut Tregoe dan Zimmerman (1980, 17), strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya organusasi untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi yang saling menguntungkan.

Clausewitz 1780-1831 (dalam cangara 2011, 236) merumuskan strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang sementara Marthin-Andron 1968 (dalam Cangara 2011, 236) strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. Strategi menghasilkan gagasan dan konsep yang di kembangkan oleh para peraktis. Strategi merupakan langkah yang memerlukan penanganan secara hati hati dalam kampanye, sebab jika penetapan

strategi salah satu keliru maka hasil yang di peroleh bisa fatal terutama kerugian dari segi waktu materi dan tenaga. Oleh karna itu strategi merupakan rahasia yang harus di sembunyikan oleh para ahli perencanaan kampanye.

Berangkat dari proses pilkada secara langsung kita bisa melihat bahwa harapan itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Meskipun di katakan pilkada secara langsung, makna langsung di sini lebih terfokus kepada adanya hak pilih dari rakyat untuk memilih kepala daerah lebih banyak di tentukan oleh pihak partai politik. Hal ini tidak lepas dari kerangka kelembagaan bahwa proses percalonan kepala daerah ini menggunakan *patry system*. Kerangka kelembagaan seperti itu berpengaruh terhadap siapa-siapa aja yang terpilih sebagai kepala daerah kalau mencermati prosedur maupun proses pemilihan didalam pilkada secara langsung secara metafora kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat perlombaan balapan mobil.

Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pilkada secara langsung manakala memiliki kombinasi di dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang menandai (Marijan 2010, 184), secara konseptual, metafora itu terjuwud dari tiga modal utama yang di miliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik, modal ekonomi, serta modal sosial.

Ketiga model itu memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Artinya, calon kepala daerah itu

memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modalitas, Argumen yang terbangun adalah bahwa semakin besar calon yang mampu mengakumulasi tiga modalitas itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah.

1. Modal Politik

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang di pandang sebagai refresentasi dari rakyat. Model ini menjadi sentral bagi semua orang yang bermaksud mengikuti di dalam pilkada langsung, baik di dalam tahap pencalonan maupun tahap pemilihan. Modal politik ini memiliki makna yang sangat penting karna pilkada secara langsung yang kita ikuti menggunakan mekanisme "*party system*" Berman, 2000 (dalam marijan 2010, 185).

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik

dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara.

2. Modal Sosial

Modal social (*Social Capital*). Yang di maksud modal social di sini adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang di miliki oleh calon dengan masyarakat yang memilih. Termasuk di dalamnya adalah sjauh

mana calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon itu harus di kenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa di dahului oleh adanya perkenalan. Tetapi, keterkenalan ataupun popularitas saja kurang bermakna tanpa di tindak lanjuti oleh adanya kepercayaan.

Di dalam ilmu politik, konsep modal sosial itu biasanya dikaitkan dengan relasi antara warga Negara dengan pemimpinnya (putman, 1993) dalam membentuk bangunan Negara demokrasi di suatu Negara atau daerah akan berlangsung secara baik mana kala masing- masing warganegara saling percaya dan bersikap moderat terhadap yang lain. sementara itu, terhadap elit politik, juga menaruh kepercayaan. Disisi lain, elit politik sendiri berusaha untuk menciptakan *performance* yang lebih baik, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap mandate yang telah di terima.

Modal sosial memiliki makna yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya kalau di bandingkan dengan modal politik. Melalui modal sosial yang di miliki, para kandidat tidak hanya di kenal oleh para pemilih. Lebih dari satu melalui pengenalan itu lebih-lebih pengenalan secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada benar-benar layak untuk di pilih atau tidak. Makna seorang calon di katakan memiliki modal sosial berarti calon itu tidak hanya di kenal oleh masyarakat melainkan juga diberikan kepercayaan.

Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan).

James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.

Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson(1982) menekankan Lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan

institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

3. Modal Ekonomi

Modal yang terakhir adalah modal ekonomi (*economic capital*) pemilu termasuk pilkada secara langsung, jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya di pakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung di pakai untuk memengaruhi pemilih. Meskipun demikian modal ekonomi memiliki makna yang penting sebagai penggerak dan pelumas mesin politik yang di pakai. Di dalam musim kampanye, misalnya, membutuhkan seperti mencetak poster, mencetak sepanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung dan berbagai kebutuhan lainnya termasuk pengaman.

Implikasi dari realitas semacam itu adalah pilkada secara langsung pada akhirnya berproses secara elit, tidak jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Yang di mungkinkan terpilih adalah kelompok elite, khususnya kombinasi elite ekonomi dan elite politik. Memang betul para pemilih bisa secara langsung memilih kepala daerah tapi proses pemilihnya tidak lepas dari model patronase. Para calon harus di dukung oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Konsekuensinya, para calon daerah memiliki ketergantungan politik dan ekonomi

pada kekuatan politik dan ekonomi pada kekuatan tertentu. Implikasi selanjutnya adalah, kekuasaan yang terbangun oleh pemilihan secara langsung itu bisa jadi bukan untuk rakyat melainkan untuk kepentingan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang memungkinkan calon para daerah itu terpilih.

2.2.2. Prilaku Pemilih

Dalam memahami kajian mengenai perilaku politik tentu tidak dapat di lepaskan perilaku memilih (*Voting Behaviour*). Menurut Fadillah (2003, 201) perilaku memilih merupakan bagian salah satu memilih dari teori politik. Teori politik tidak hanya menjelaskan perilaku memilih, tetapi juga menyangkut sikap politik seseorang ideologi dan partisipasi politik. Perilaku memilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang di rasakan paling di sukai.

Menurut Surbakti (dalam Ely 2006, 11) perilaku memilih adalah efektifitas pemerintah suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam suatu pemilihan umum bila woters atau pemilih memutuskan untuk memilih maka akan memilih atau dukungan kandidat tertentu. Perilaku memilih dalam pemilu juga di analisis oleh Schumpeter (1966),

dalam Firmanzah (2007, 105). Menurut dia, pemilih mendapatkan informasi politik dalam jumlah besar dan beragam, sering kali berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif. Di tengah-tengah informasi yang melimpah pemilih di hadapkan pada kondisi yang sangat

sulit untuk memilah milih informasi misalnya apakah informasi yang di terima berdasarkan persepsi serta judgement saja. Sehingga tidak aneh bila diskusi tentang perilaku memilih bermuara pada perdebatan apakah pemilih bersifat rasional atau tidak rasional dalam pemilu.

Sementara itu, Brennan dan Lomasky (1977) serta Fiorina (1976) dalam Firmanzah (2007, 104) menyatakan bahwa keputusan pemilih selama pemilu adalah perilaku ekspresif. Perilaku ini tidak jauh dengan perilaku supporter yang memberikan dukungannya kepada sebuah tim sepakbola. Menurut mereka perilaku memilih sangat di pengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoanya. Begitupun juga sebaliknya pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan. Jadi, jadi konsep loyalitas di sini harus di lihat dari dua arah yaitu konstituen kepada partai politik dan partai politik ke konstituen. Selain itu perilaku memilih juga sarat dengan kedekatan ideologi antara pemilih dan juga partai politik.

Perilaku memilih dan partisipasi politik merupakan hal yang berkaitan karena perilaku politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Menurut Huntington dan Nelson (1999, 16) menyatakan bahwa salah satu bentuk partisipasi politik adalah kegiatan yang mencakup “suara” atau sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam satu pilihan mencari dukungan bagi seorang calon atau tindakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan.

2.2.3. Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan sewaktu-waktu muncul kepermukaan sebagai kekuatan politik dominan. Secara empiris, akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Menurut Castells, dalam Buchari (2009, 19) politik identitas merupakan partisipasi individual dalam kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikokultural dari seseorang individu memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuk identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.

Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka, berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan manipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kristianus (2009, 225) dalam Buchari (2009, 20) mengemukakan bahwa politik identitas berkaitan dengan perbutaan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama, perjuangan politik identitas pada dasarnya ialah

perjuangan kelompok atau orang-orang pemikiran baik secara politik, sosial dan ekonomi.

Sebagaimana makna yang di kandung dalam istilah politik, maka politik identitas esensinya adalah uapaya untuk mencapai kekuasaan tertentu dalam kehidupan dan panggung politik, di mana pengakuan dan keberadaan wakil-wakil dari kelompok etnis merupakan bagian penting dari perjuangan politik yang di lakukan demi kepentingan kelompok etnisnya (Buchari 2009, 21).

Dalam hubungan ini, Brown dalam (Subianto 2009, 335) mengatakan bahwa indentitas kelompok menunjang kontruksi sosial untuk mempromosikan keterwakilan kepentingan kelompoknya. Prilaku sosial politik menjadi terkait identitas kelompoknya nuntut pada suatu momen tertentu di bangkitkan demi kepentingan kelompok.

Identitas atau jati diri itu muncul dan ada dalam interaksi seseorang mempunyai jatu diri tertentu karna di akaui keberadaanya oleh orang lain dalam suatu hubungan yang beralaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tampak bahwa seseorang atau kelompok membutuhkan jati diri yang di gunakan dalam interaksi. Hal ini berarti dalam setiap interaksi mengambil sesuatu posisi. Buchari (2009, 20-21)

Dalam hubungan ini, Nonini dan Ong (1997) dalam Buchahri (2009, 22) memberikan penegasan bahwa identitas di lihat dari suatu proses membutuhkan atau konstruksi sosial yang setabil yang berlaku dalam suatu jaringan kekuasaan. Sedangkan Huntington (2004) dalam Buchari (2009, 22) mengatakan bahwa

identitas ialah kesadaran diri seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Dalam hal ini Huntington berkesimpulan bahwa identitas ialah tanggapan orang terhadap diri mereka sendiri tetapi anggapan mereka itu di pengaruhi tanggapan orang lain terhadap mereka.

Seseorang mempunyai sesuatu jati diri tertentu, karna di akui keberadaannya oleh orang lain dalam suatu hubungan yang yang berlaku. Penekanan pada pengakuan orang-orang lain dalam hal kebenaran dalam kelestarian sesuatu jati diri yang di miliki oleh orang tersebut, menjadi penting untuk di perhatikan, karna dalam kesendiriannya yang absolut seseorang tersebut tidak mempunyai jati diri. Politik identitas berbeda dengan nasionalisme. Dalam lingkup bangsa (*nation*) kehadiran politik identitas menciptakan tekanan-tekanan dari kaum reduksionis (*reductinist*) sehingga dapat memperlemah identifikasi sebagai anggota dari suatu bangsa contoh, seseorang merasa dirinya sebagai anggota kelompok dari minat yang sama terlebih dahulu, dan berikutnya baru memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan demikian, politik identitas di dalam fenomena empiris memperlihatkan secaranya proses terjadinya perubahan besar yang berlimaks pada bersatu padu etnis dalam memperjuangkan perikeadilan dan prikemanusiaan, secara kukuh dan kuat.

Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik: Pelaksanaan pemilu di Indonesia ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu-isu yang berkaitan dengan etnis, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya. Maraknya diskursus yang mengaitkan isu agama dan politik dalam pemilu serta munculnya gelombang

unjuk rasa yang menyertai Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 merupakan indikasi menguatnya politisasi identitas.

Politisasi (politicization) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Sementara yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yakni kategori sosial di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki 'identitas' yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan. Politisasi identitas diartikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas apakah itu berbasis agama, etnis, atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini atau stigma dari masyarakat dengan tujuan kepentingan politik.

Mencermati praktik politisasi identitas yang terjadi di Indonesia ditandai dua hal. Pertama, setiap aktor yang bertarung dalam mengikuti pemilu dominan memainkan modal mereka dari modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, Namun demikian, modal yang paling berperan dalam kontestasi politik adalah modal sosial dan modal politik serta didukung oleh modal ekonomi.

Modal sosial yang dimiliki aktor adalah jaringan dan relasi dalam masyarakat yang diciptakan melalui jaringan dalam bentuk investasi sosial, yakni sebagai aktivis dan syiar agama sedangkan jaringan aktor dibangun melalui pimpinan partai politik, pengusaha dan elit politik. Modal politik senantiasa

didukung oleh kuatnya hubungan antara aktor dan partai politik serta pengalaman aktor di birokrasi, baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Identitas agama dan etnis yang dipropagandakan dalam kontestasi politik hanyalah sebagai alat legitimasi politik sesaat untuk kepentingan politis. Pertentangan antara kelompok Islam dan nasionalis sengaja diciptakan oleh aktor politik. Sehingga, dampak dari praktik politik identitas jika senantiasa direproduksi akan memicu disintegrasi yakni, ketimpangan antar kelompok dan konflik komunal.

2.2.4. Tipologi Pemilih

Analisis mendalam dan lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk memahami Perilaku Pemilih, Sebelum Membahas jenis-jenis Pemilih berdasarkan aliansi mereka terhadap partai politik. Sementara itu pada kenyataannya pemilih dimensi yang sangat kompleks. Begitu banyaknya karakteristik dan dimensi yang harus di analisis membuat analisis karakteristik pemilih menjadi terbatas jika hanya di dasarkan pada pendukung atau masa mengambang. Para pendukung maupun non pendukung sebenarnya sama-sama memiliki karakteristik sebagai pemilih yang rasional dan non rasional. Dua dimensi ini akan selalu di temukan dalam masing-masing individu pemilih. Hanya saja kadar dan drajat satu sama lain memang berbeda. Bauran kedua dimensi ini di harapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara pemilih menentukan cara suatu partai politik dalam tipologi ini amat menentukan cara partai politik dalam mengembangkan hubungan dengan masing-masing konfigurasi yang muncul.

Tipologi pemilih berdasarkan pertimbangan bahwa pemilih mengangkut pandangan yang objektif sekaligus subjektif ketika memilih sebuah partai atau seorang kontestan bahwa masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu : (1) Orientasi Policy-problem-solving dan (2) orientasi ideology, ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan. Menurut (Champan dan palda, 1983 dalam Firmazah (2007, 130). Tingkat pendidikan dan ekonomi, misalnya di yakini dapat di pengaruhi pemilih dalam membuat keputusan untuk memilih.

2.2.5. Pemilih Rasional

Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (Rational voter) dalam konfigurasi ini, pemilih memiliki orientasi tinggi pada policy Problem-solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau platform partai bisa di analisis dalam dua hal : (1) kinerja partai dimasa lampau (*back word looking*), dan tawaran program kerja untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada (*forward-looking*). Kedua hal tersebut sama-sama mempengaruhi pemilih. Mereka tidak hanya melihat program kerja atau platform partai yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah di lakukan oleh partai tersebut di masa lampau. Kinerja partai atau calon kontestan biasanya termanifestasikan pada dan citra (image yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini yang lebih utama sebagai partai politik dan kontestan adalah mencari cara agar mereka bisa

membangun reputasi di depan public dengan mengedepankan kebijakan untuk mengatasi permasalahan nasional.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan idiologi kepada suatu partai politik atau seseorang kontestan. Faktor seperti faham asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikografis memang di pertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang sinitifikan. Pemilih dalam hal ini ingin melepaskan hal hal yang bersifat dogmatis, tradisional, dan ikatan lokasi kehidupan politiknya. Analisis kongnitif dan pertimbangan logis sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa dan yang telah di lakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, dari pada faham nilai partai atau kontestan (firmanzah 2007, 134).

Sementara itu Newman dalam Nursal (2004, 167) mengatakan bahwa pemilih rasional adalah pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihannya.

Seperti yang kita ketahui pemilih rasional menurut saya sendrung akan diam ketika melihat isu yang bersifat agama, identitas, dan juga simbolik di gaungkan karena mereka membutuhkan waktu dan proses informasi dan isu tersebut. Akan tetapi dalam proses penerjemahan onformasi tersebut faktor emosional alam bahwa sadar masih dominan sehingga proses penerjemahan informasi terdistrosi oleh faktor-faktor yang secara tidak sadar membentuk pola piker.

2.2.6. Pemilih Kritis

Dalam bagian kedua terdapat pemilih yang kritis. Pemilih jenis ini merupakan perbandingan antara tingginya orientasi pada kemampuan politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak mudah pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme.

Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritik kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatar belakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini adalah pemilih jenis kritis, artinya mereka selalu menganalisis kaitan antar sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan platform partai (1) memberikan kritik internal (2) fustasi dan (3) membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideology dengan partai lama. Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kontestan. Gejala munculnya jenis pemilih . pemilih jenis ini harus di manage sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau

seorang kontestan. Pemilih memiliki keinginan atau kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai politik.

Seperti yang kita ketahui pemilih kritis ini mempunyai tingkat pemikiran yang luar biasa, pemilih kritis akan memberikan sebuah kritikan mengenai baik buruknya suatu jalan pemerintahan dan juga apa kebijakan yang di berikan oleh pemerintah. Misalnya pada saat mereka melakukan pemilihan mereka lebih mengedepankan suatu ideology yang menurut mereka harus di kedepankan, pemilih ini juga terfokus pada keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai politik yang di anggap belum mampu menyelesaikan setiap perolaan yang ada di pemerintahan.

2.2.7. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai asal usul paham agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapat dan pendidikan pemilih tradisional adalah pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2002). Dalam Firmanzah 2007 , 137). Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini. Apasaja yang di bilang dan di katakan oleh seorang pemimpin politik merupakan sebuah kebenaran yang sulit di bantah. Ideology di anggap sebagai suatu landasan dalam membuat keputusan

serta bertindak, dan terkadang kebenarannya tidak bisa di ganggu gugat. Oleh sebab itu, apa saja yang di utarakan pemimpin politik di anggap sebagai petunjuk dalam sikap dan bertindak.

Menurut Ahmad (2015, 82) pemilih tradisional adalah pemilih yang di anggap pragmatis dan sebagainya menjadi zona diskurusus yang se akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun kesadaran.

Pemilih tradisional pada umumnya pemilih yang memilih tidak ada prinsip dari dirinya sendiri, pemilih tradisional lebih cenderung mudah terprobokasi pada sebuah perkataan yang belum tentu kebenarannya dan juga contoh lain dari pemilih tradisional ini dapat kita lihat pada saat pemilihan mereka lebih cenderung mempunyai cara pandang tersebut misalnya mereka memilih calon berdasarkan apa yang dikatakan oleh tim sukses yang mengkampanyekan calon dan apapun yang dikatakan oleh para kandidat sulit di bantah.

2.2.8. Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin disuatu negara demokrasi. Pemilu juga merupakan tolak ukur apakah demokrasi akan berjalan dengan baik atau malah sebaliknya. Menurut Schumpeter (dalam Sardini 2011, 1) menyatakan bahwa penyelenggara pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama baik klasifikasi apakah sebuah sistem politik disuatu negara sebagai sebuah negara demokrasi. Pemilu merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam proses politik.

Pemilihan umum dibagi menjadi beberapa kategori yaitu : pemilihan umum presiden , pemilihan umum legislatif, dan juga pemilihan umum kepala daerah. Menurut UU nomor 8 tahun 2015 pasal 1 menjelaskan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih Gubernur, Bupati, walikota, dan juga termasuk Kepala Desa.

Pilkada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih kepala daerah yang sangat berkualitas pilkada secara langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraan yang lancar dan damai tetapi juga manfaat dan hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas dari sisi manajerial dan kompetensi.

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, Salah satu penelitian skripsi yang relevan bagi penulis adalah yang dilakukan peneliti oleh :

1. Mhd.Rafi Yahya dengan judul Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Jefry Noer dan Ibrahim Ali di Pilkada Kabupaten Kampar.(studi kasus dalam penelitian tersebut ialah dimana pasangan Jefry dan Ibrahim dapat memenangkan pilkada di Kabupaten Kampar yang di pengaruhi berbagai faktor). Berdasarkan hasil penelitian,dapat di gambarkan bagaimana Pemilihan

Kepala Daerah di Kabupaten Karangayar. Identifikasi yang tergambar di dalam penelitian tersebut apakah faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Jefry dan Ibrahim dalam pilkada, dan juga bagaimana perilaku masyarakat yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Kampar.

Adapun metode yang di gunakan oleh : Mhd.Rafi Yahya menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Melalui metode penelitian yang peneliti gunakan tersebut, dapat kita lihat faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemenangan pasangan calon tersebut.

2. Penelitian yang dihasilkan oleh Masdiyana Putri, dengan judul Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, hasil dari penelitian mengemukakan bahwa faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim pada pilkada di Kabupaten Bantul tahun 2015 di pengaruhi oleh 3 faktor. Pertama koalisi partai politik, di mana pendukung pasangan calon tersebut memiliki strategi inteleni, strategi ini di gunakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya pemenangan suara. Kedua partisipasi politik, keterlibatan masyarakat bantul dalam pemberian hak suara dalam pilkada tahun 2015 meningkat di bandingkan dengan tahun 2010 dan tertinggi di antara kabupaten yang lainnya.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu: mendapatkan pemimpin yang bisa membawa perubahan di Bantul. Ketiga modalitas, modalitas ini terdiri dari

modal politik, modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian Masdiyan Putri (2015) ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling.

3. Penelitian yang di hasilkan oleh Hermini berjudul tentang’’ Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kabupaten Batang 2011, penelitian yang di lakukan oleh Hermini memfokuskan kepada faktor determinan apa yang membuat kemenangan kandidat pada pilkada 2011, sedangkan metologi yang di gunakan dalam penelitian Hermini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dan melakukan analisi mengenai pertimbangan-pertimbangan pemilihan yang dominan dalam membuat keputusan. Di dalam penelitian ini adanya suatu persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaan dalam penelitian ini dapat di lihat pemilih di Kabupetn Bantang lebih memilih seorang pemimpin berdasarkan modalitas serta berdasar figuritas masing-masing kandidat yang ikut dalam Pemilukada, sedangkan perbedaan antar penelitian ini lebih kepada metodologi yang di gunakan oleh Hermini.
4. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Faisal yang meneliti mengenai Fenomena kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dengan identifikasi masalah ialah beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan PKS pada pemilu Legislatif Tahun 2004 di Kota Ambon. Berbagai kalangan termasuk sebagian akademisi telah mengklaim bahwa kemenangan PKS baik di tengah nasional pada tingkat daerah sangat di tentukan oleh kemampuan para elit mereka dalam

memprediksi dan mengimplementasikan wacana dominan kepada masyarakat. Sama halnya dengan kemenangan PKS pada pemilu 2004 di Kota Ambon. Pada penelitian Faisal dengan penelitian penulis terdapat persamaan maupun perbedaan di antaranya ialah perbedaannya terdapat pada partai yang akan diteliti oleh peneliti Faisal dan juga perbedaan yang lainnya terdapat pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menangnya Partai PKS di Kota Ambon. Pada Pemilu legislatif pada tahun 2014, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah pada metode yang digunakan dalam penelitian Faisal metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan teknik wawancara, dokumentasi.

Pada penelitian Faisal ini mengungkapkan gejala-gejala dan fenomena-fenomena voting behavior di masyarakat secara obyektif. Bertolak dari rangkaian data primer yang diperoleh dari para aktivis PKS dan para pengurus partai Islam lain, para pemilih pada daerah-daerah basis dan bukan basis PKS, para tokoh agama dan tokoh adat serta intelektual.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi inti dari penelitian ini. Dari fenomena yang ada yaitu; Judul dari penelitian ini adalah 'Faktor Kemenangan Asmadi Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Rasau Kabupaten Mempawah Tahun 2020'. Identifikasi masalah yaitu 'Pada Pemilihan Kepala desa sungai raau Kabupaten Mempawah tahun 2020

terdapat salah satu calon yang terdiri dari suku melayu, yakni Asmadi dan berhasil mengungguli paslon suku madura.

Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan meneliti Faktor Kemenangan Asmadi Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Rasai Kabupaten Mempawah 2020. Untuk meneliti permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Kacung Marijan (2010, 184) modal yang dimiliki para calon yaitu, Modal Politik, Modal Sosial, Modal ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti berharap bisa mengetahui Faktor Kemenangan Asmadi Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Rasau Kabupaten Mempawah Tahun 2020.

Faktor Kemenangan Asmadi Pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Rasau Kabupaten
Mempawah Tahun 2020



Identifikasi Masalah:

Asmadi dapat mengalahkan ke empat pasangan calon yang beretnis Madura, dan memperoleh suara terbanyak pada pikades 2020 di Desa Sungai Rasau. Dengan tiga modalitas.



Teori :

Kacung Marijan (2010, 184) Teori Faktor Kemenangan:

1. Modal Politik
2. Modal Sosial
3. Modal Ekonomi



Output Penelitian :

Kemenangan Asmadi sebagai Kepala Desa

2.5. Pertanyaan Pemilih

Dapat di uraikan pemilih yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini terdapat tiga modalitas yaitu: Modal politik, modal sosial dan modal ekonomi.

2.5.1. Modal Politik

1. Bagaimana saudara memilih Asmadi tersebut apakah lebih melihat dari politiknya, atau lebih mengenali organisasi politik yang menjadi pengungsu sehingga anda memilih asmadi. ?
2. Apakah saudara memilih Asmadi lebih melihat pada pengalaman politik yang melekat pada Asmadi.?
3. Apakah Asmadi tersebut pada proses kampanye ada organisasi masyarakat yang membantu mengkampanyekan Asmadi tersebut.?

2.5.2. Modal Sosial

1. Bagaimana pandangan saudara melihat relasi Asmadi tersebut dengan masyarakat dari segi sosial yang Asmadi miliki.?
2. Apakah saudara memilih Asmadi tersebut melihat dari prestasi yang Asmadi capai sebelumnya?
3. Apakah Asmadi tersebut sudah memiliki nilai sosial yang lebih tinggi di bandingkan dengan calon kades lainnya pada saat sosialisasi.?

2.5.3. Modal Ekonomi

1. Apakah faktor yang membuat saudara memilih Asmadi tersebut di lihat dari segi ekonomi yang di miliki Asmadi tersebut?
2. Apakah Asmadi tersebut sudah membantu bangunan di Desa Sungai Rasau melalui lembaga masyarakat yang ada di Sungai Rasau